

# Politik Identitas dalam Bingkai Keberagaman di Radar Sampit

*by* Anastasia Yuni Widyaningrum

---

FILE	3BC-POLITIK_IDENTITAS_DALAM__ANAS.PDF (14.92M)		
TIME SUBMITTED	21-OCT-2020 08:28PM (UTC+0700)	WORD COUNT	5683
SUBMISSION ID	1422022250	CHARACTER COUNT	38033

# Politik Identitas dalam Bingkai Keberagaman di Radar Sampit

4

**Anastasia Yuni Widyaningrum, Mateus Yumarnamto, V. Luluk Prijambodo**

*Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kota Surabaya*

*e-mail: Anastasia\_widya@ukwms.ac.id*

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara demokratis sedang berusaha untuk menuju demokrasi maju. Untuk itu maka dilaksanakan Pemilihan Umum yang berangsur 5 tahun sekali. Namun keriuhan persiapannya terjadi dalam rentang lima tahun menjelang hari pelaksanaan. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan keberagaman Indonesia seringkali dikaitkan dengan Pemilu. Namun dalam perjalanannya menuju negara demokrasi yang maju, Indonesia seringkali terpeleket dalam demokrasi dengan politik identitas yang kuno atau primordial. Artikel ilmiah ini merupakan riset awal skema PDUPT dengan judul “Potret Keragaman Masyarakat Indonesia Dalam Media, Institusi Pendidikan, Dan Masyarakat” untuk tahun kedua dengan kontrak penelitian 220N/WM01.5/N/2019.

Menurut Hayward dan Watson (2010) politik identitas adalah sebuah konsep yang secara umum dipahami sebagai sesuatu yang bisa diakui mengenai cara hidup dan menjadi manusia, dimana kemudian tidak ada satu pun manusia yang tak punya identitas. Identitas ini meliputi rasial, etnisitas, gender, seksual, dll. Bagihayward orang orang yang sepakat atau setuju, maka identitas memberikan peluang untuk memberikan kebebasan, sedangkan bagi lainnya yang tak sepakat, identitas memberikan kesempatan untuk melakukan kekerasan dan pemaksaan.

Menurut pemikiran Hayward dan Watson tersebut maka identitas seperti pisau bermata dua. Pertama, membebaskan individu untuk dapat menentukan hidup dan keberadaan dirinya. Menurut sudut pandang ini, selain mengejar kebebasan dirinya sendiri juga sekaligus memberikan kebebasan kepada orang lain untuk mencari kehidupannya. Kedua, memberikan peluang untuk memberikan pembenaran akan apa yang diyakini benar. Kerentanan pemikiran tersebut dalam sejarah banyak

kisah bagaimana identitas diri atau kelompok dianggap lebih baik dibandingkan identitas orang lain atau kelompok lainnya.

Hayward dan Watson (2010) juga menjelaskan bahwa politik identitas adalah politik dimana orang-orang terlibat dalam gerakan yang sangat mendasar dan kemudian mendefinisikan pengalamannya, permasalahan politis dan tujuannya adalah kebaikan dari kelompok mereka sendiri. Dalam sejarah, politik identitas selalu berkaitan dengan kekerasan, ketidaksetaraan dalam masyarakat dan kesempatan untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu.

Dokumen yang dikeluarkan oleh CSIS (2018) disebutkan bahwa ada usaha-usaha politik identitas untuk memberikan pengaruh pada perilaku pemilih, namun dalam dokumen CSIS disebutkan bahwa pengaruh tersebut lemah terutama dalam mobilisasi massa berdasarkan issue keagamaan sangat lemah. Sebaliknya para pemilih memilih berdasarkan kredibilitas, integritas dan program kerja calon presiden 2019. Hal ini menunjukkan bahwa politik identitas semakin ditinggalkan.

Politik identitas semakin ditinggalkan, namun usaha untuk menggoyang pemerintahan yang legitimate tetap terjadi, meski peristiwa sebenarnya mengarah ke kegiatan kriminal, namun menjelang pemilu indikasi politik identitas semakin menguat.

11

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Framing dengan model dari Robert K. Entman (Eriyanto, 2012) dengan empat tahapan sebagai alat metodenya, yaitu: (1) Mendefinisikan masalah, (2) Mengidentifikasi penyebab permasalahan tersebut, (3) Keputusan moral apa yang ditonjolkan, (4) adakah rekomendasi penyelesaian dari permasalahan yang sudah disampaikan pada poin pertama. Subyek penelitian merupakan Surat Kabar Harian Radar Sampit yang beredar pada Februari 2018. Pada bulan Februari 2018 ada konflik yang bernuansa SARA yaitu penyerangan pemuka agama di gereja di Yogyakarta dan di bulan tersebut ada perayaan IMLEK.

## **Pembahasan**

### **Berita Pertama**

Radar Sampit, Rabu 14 February 2018

Judul Berita : Radikal Karena Sebuah Kelompok Dan Internet

Berikut ini temuan data dan analisisnya:

*Define Problems*, bagi Radar Sampit, permasalahan utama peristiwa ini adalah bagaimana cara penyebaran paham radikalisme, sehingga berakibat pada penyerangan terhadap pemuka agama. Oleh Radar Sampit dijelaskan bahwa permasalahan ini menjadi serius, karena paham radikal bersumber dari internet dan lingkungan sekolah. Disebutkan dalam berita bahwa selama SMA, Suliono (pelaku penyerangan) sekolah di Palu dan kemudian mengikuti kegiatan organisasi keagamaan. Tidak disebutkan dalam berita apakah organisasi keagamaan tersebut bentukan sekolah, namun hanya disebutkan pada masa Suliono menjalani pendidikan menengah atas. Dimana kemudian diindikasikan bahwa organisasi keagamaan tersebut mempunyai ajaran yang bersifat radikal.

Disebutkan “kelompok di Sulawesi Tengah” dituding mempunyai andil dalam akidah-akidah yang dipelajari oleh Suliono. Gerakan ISIS juga dituding sebagai sumber masalah yang menyebabkan Suliono melakukan aksi penyerangan terhadap gereja. Secara geografis Indonesia yang berjarak ribuan kilometer dari Suriah, namun penyebaran paham ini melalui internet ditengarai sebagai salah satu pemantik aksi.

“...Kendati ISIS sebagai sumber radikalisme telah hancur, proses penyebaran paham radikal masih berlangsung. Pelaku penyerangan gereja Santa Lidwina, Suliono buktinya. Dia terpapar paham radikal dari sebuah kelompok di Sulawesi Tengah...”

*Diagnose Causes*, Penyebab tumbuhnya radikalisme di Indonesia menurut Radar Sampit adalah tumbuhnya ajaran-ajaran yang berbeda dengan pemahaman umum yang diterima oleh masyarakat Indonesia dan juga paham-paham yang dianggap salah. Dimana akidah yang berbeda dan keliru tersebut kemudian diwujudkan melalui penyerangan kepada kelompok yang dianggap menyalahi akidah dan ajaran yang diterima oleh pelaku penyerangan. Berikut ini pernyataannya:

“...Dari situlah dia belajar akidah yang berbeda paham,” Dia menjelaskan, tercatat juga bahwa Suliono belajar dari internet terkait paham keliru itu. dan, akhirnya muncul dorongan untuk melakukan aksi penyerangan di Jogjakarta tersebut...”

Menggunakan diksi ‘berbeda paham’ dan ‘paham keliru’ Radar Sampit menunjukkan bahwa paham yang dipahami Suliono (pelaku penyerangan) adalah hal yang ditolak oleh narasi besar mengenai keindonesiaan.

Bahkan tergolong dalam kelompok paham yang keliru dan berbeda. Yang menjadi problem adalah ketika paham ini tidak selaras dengan semangat keindonesiaan maka menjadi problem dan cenderung diinfiltrasi dengan cara kekerasan.

*Make Moral Judgement.* Radar Sampit menilai bahwa pelaku penyerangan adalah oknum, pihak yang berbeda paham, pihak yang pemahamannya salah, tidak sesuai dengan akidah yang benar. Penilaian ini digunakan untuk mendasari pemikiran bahwa paham radikal adalah paham yang berbeda dengan kebhinekaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Oleh Radar Sampit Paham radikal dinilai sebagai paham yang datang dari luar Indonesia, yang menggerus nilai-nilai keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia sejak dahulu. Meskipun Radar Sampit tidak menggunakan kata radikal, namun menggunakan kata *lone wolf* yang merujuk pada aksi pribadi dan mandiri sebagai bentuk ekspresi radikalisme. Untuk hal ini Radar Sampit menunjukkan bahwa pelaku bergerak sendiri tidak terhubung dengan organisasi apapun ditanah air. Pemikiran ini dihasilkan setelah menginterpretasikan teks berikut.

“...Sebelum melakukan aksi, Suliono ini juga mengakses internet untuk mencari alamat gereja terdekat serta, tempat mencari senjata. Setyo menjelaskan, akhirnya dipilih gereja yang diserang itu. “dengan semua ini, kami masih memandang bahwa pelaku ini *lone wolf*,” paparnya...”

*Treatment Recommendation.* Sebagai langkah solutif menyelesaikan problematika yang dimunculkan melalui berita, Radar Sampit memberikan rekomendasi penyelesaian masalah yang bersumber dari kutipan Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasito, sebagai berikut.

“...Menurutnya bila ada orang asing yang berada dilingkungan kampung, saat ada yang melapor ke kepolisian setempat tentu akan ditangani. “Polisi kan bisa untuk melakukan upaya pemeriksaan dan sebagainya. Sehingga, bisa dicegah sebelum terjadi aksi...”

Berdasarkan kutipan ini, Radar Sampit menampilkan bahwa langkah nyata mengatasi problematika isu SARA penyerangan terhadap simbol keagamaan adalah masyarakat harus partisipatif menjaga keamanan lingkungannya masing-masing, melaporkan kepada polisi bila ada tindakan mencurigakan. Namun tidak disinggung mengenai upaya menangkal penyebaran melalui internet.

Pada berita pertama ini bingkai berita mengarah kepada sumber-sumber informasi dan agen sosialisasi dari gerakan radikalisme di tanah air. Sumber informasi dan sosialisasi tersebut berasal dari internet dan masyarakat. Sayang di bagian *treatment recommendation* tidak ada solusi praktis mengenai tindakan melacak dan menghentikan sumber radikalisme. Meski penyebab masalah sudah terpapar jelas. Bahkan tugas penanggulangan radikalisme dikembalikan ke masyarakat. Terjadi kekosongan tugas dan peran pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan radikalisme.

Berita pertama Radar Sampit berjudul ‘Radikal Karena Sebuah Kelompok dan Internet,’ membingkai tentang masih mudahnya akses paham radikal di Indonesia, disini pelaku penyerangan gereja Santa Lidwina, mudah mengakses informasi radikalisme secara konvensional (di SMA, dan organisasi keagamaan) maupun melalui internet, yang menjadi cikal-bakal dirinya menyerang gereja. Selain itu partisipasi masyarakat oleh Radar Sampit dinilai masih kurang, dalam menanggapi potensi radikalisme di masyarakat.

Al-Banna dalam Kholik (2017 : hal. 16) yang juga mengutip hasil riset Center for Religious and Cross Cultural Studies Universitas Gajah Mada dan lembaga kajian Islam dan social (LKIS) Yogyakarta menjelaskan bahwa pendidikan konvensional utamanya SMA, para pelajarnya memiliki kecenderungan yang keras (radikal) dalam memahami keagamaan. Disebutkan bahwa mentor alumni, lembaga formal sekolah OSIS, dan organisasi kerohanian, memberi peran terhadap doktrinisasi radikal keagamaan. Seada, Zekiyah dalam Kholik (2017 : hal. 17) mengutip hasil penelitian LAKIF (Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian) memaparkan, guru dan siswa pada tingkat SMA di daerah JABODETABEK sebanyak 84,8 (85%) setuju dengan pemberlakuan syariat Islam, sebanyak 25,8 atau 26 % menjawab Pancasila tidak lagi relevan. Hal ini memberi gambaran bahwa pendidikan konvensional ditanah air telah “terjangkit” paham-paham radikalisme. Tidak heran kemudian ketika kemunculan kasus penyerangan gereja Santa Lidwina kemudian dikaitkan dengan pendidikan konvensional yang ia terima. Bahwa pelaku penyerangan, dan pihak-pihak radikal lainnya yang muncul di Indonesia adalah korban dari radikalisme yang menyusup dalam sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan yang telah disusup oleh radikalisme menciptakan kelompok-kelompok radikal, yang pada akhirnya menyerang keberagaman di Indonesia.

Apalagi disebutkan peran serta masyarakat dalam menangkal radikalisme masih kurang. Masyarakat dianggap kurang respon melaporkan potensi-potensi radikalisme yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya. Nihaya (2014 : hal. 27) dalam risetnya menyebutkan, masih banyak kelompok sektarian di Indonesia yang menganggap dirinya lebih baik dari yang lainnya, disatu sisi kelompok sektarian ini juga menolak gerakan radikalisme apalagi bermuatan agama, karena agama dianggap tidak mengajarkan radikalisme. Ini memperlihatkan bahwa meski menolak radikalisme, respon masyarakat terhadap radikalisme pada akhirnya akan terbentur dengan sikap sektarian masyarakat itu sendiri yang “terkadang” masih menganggap nilainya jauh lebih baik dari nilai yang dimiliki oleh kelompok lain.

### **Berita kedua**

Radar Sampit, Sabtu, 17 February 2018

Judul Berita : Minta Elit Hentikan Politisasi SARA

*Define Problems.* Permasalahan yang diangkat Radar Sampit dalam berita ini adalah politik identitas di Pilkada yang dapat berbenturan dengan issue SARA. Permasalahan ini menjadi ancaman serius karena digaungkan oleh elit atau aktor intelektual, yang bahkan rela mengorbankan semangat persatuan dan perdamaian masyarakat Indonesia hanya karena kepentingan kekuasaan elit atau aktor intelektual tersebut. Penggambaran permasalahan ini ditulis cermat oleh Radar Sampit pada penulisan berikut.

“...Jangan sampai melakukan politisasi identitas, yang justru mengoyak kenyataan kedamaian Indonesia,” kata Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief di sela-sela kunjungannya di Klenteng Cin Tek Yen Jakarta, kemarin (16/2)..”

Permasalahan ini menjadi menarik dan layak diperhitungkan, karena tata letak dan pengutipan yang dilakukan oleh Radar Sampit, mengambil penulisan permasalahan pada *pad*, dengan narasumber yang diambil untuk membicarakan ini adalah **kata Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief**, yang relevan membicarakan ancaman kerukunan SARA. Dalam kutipan tersebut dapat dilihat bahwa situasi damai di Indonesia itu dikoyakkan oleh politik identitas. Artinya ada sumber lainnya yang bukan dari anggota masyarakat lainnya, namun lebih kepada identitas primordial yang

rentan untuk dipolitisasi dalam tahun politik ini.

*Diagnose Causes*, penyebab utama dan paling mendasar dari penggunaan politik identitas adalah motif kepentingan politik dan kekuasaan. Dijelaskan Radar Sampit, “permainan” politik identitas dilakukan oleh elit atau aktor politik, demi kepentingan elektoral politik, yang menunjang dirinya naik di kursi kekuasaan pada Pilkada 2018. Radar Sampit menggambarkan bahwa kenyataannya masyarakat hidup rukun dan damai, sehingga munculnya politik identitas dianggap sebagai “dalang” utama penyebab konflik SARA dimasyarakat. Penggambaran ini muncul sebagai hasil interpretasi teks berikut.

“...Kalaupun ada konflik berbau identitas di Indonesia, lanjutnya mayoritas peristiwa itu lahir dari motif politik. Oleh karenanya jelang Pilkada dan pemilu nasional, dia meminta elit tidak menggunakannya. “ Politik identitas yang sering kali mengganggu kenyataan bahwa kita bisa hidup damai,” imbuhnya...”

Berdasarkan teks inilah, Radar Sampit melihat bahwa politik identitas menjadi penyebab utama konflik di masyarakat. Politik identitas ini membentuk polarisasi di masyarakat berdasarkan identitas primordial. Padahal hal ini tidaklah sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, yang mengatas-namakan keberagaman sebagai tolak ukur kehidupan bermasyarakat.

*Make Moral Judgement*, mendukung penyebab permasalahan yang ditampilkan, yakni motif kepentingan politik dan kekuasaan. Radar Sampit mengemas penilaian moralnya, dengan menempatkan permasalahan ini sebagai permasalahan yang serius, terjadi karena ada elit yang berniat memecah belah SARA. Permasalahan ini menjadi serius karena bertolak belakang dengan nilai-nilai kesatuan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yang menghargai perbedaan sebagai kekayaan intelektual bangsa. Sehingga pengkubuan yang dilakukan melalui politik identitas adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai keberagaman dan kesatuan bangsa. Untuk hal ini Radar Sampit mengemas masyarakat sebagai pihak yang mencintai perdamaian, datang dari golongan yang menghargai simbol-simbol SARA lainnya. Salah satu contohnya adalah perayaan Imlek yang bisa dirayakan oleh banyak kelompok SARA. seperti yang dikutip Radar Sampit dibawah ini

1  
“...Sementara itu, anggota dewan pengarah UKP PIP Mahfud MD menambahkan, perayaan Imlek tahun ini diharapkan bisa



memperkokoh semangat persatuan. Pasalnya, Imlek yang merupakan budaya Tionghoa dalam praktiknya banyak diikuti penganut agama lain.

“Imlek bisa melambangkan kerukunan. Simbol kerukunan kita, semua suku dan agama bisa merayakan Imlek,” ujarnya. Mahfud berharap semangat itu bisa terus dibawa di tengah isu identitas yang terus menguat belakangan ini..”

Memunculkan penilaian moral ini, Radar Sampit ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa, kehidupan beragama di Indonesia berjalan rukun, buktinya adalah Imlek sebagai simbol kerukunan dengan semua suku dan agama bisa merayakan Imlek. Sedangkan politik identitas adalah penyebab terjadinya konflik kerukunan SARA.

*Treatment Recommendation*, langkah solutif Radar Sampit untuk menyelesaikan permasalahan adalah menyarankan agar menegakkan hak-hak hukum dan politik masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah atau nilai-nilai kebangsaan yang beragam, dan plural. Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus menjamin hak-hak ini berlaku rata dimasyarakat, tanpa ada tendensi kepentingan politik yang menyertai jalannya hak-hak tersebut. Pemerintah juga diminta tegas menghentikan pengelompokan masyarakat, karena politik identitas yang selama ini “digaungkan” demi kepentingan elektoral politik semata. Rekomendasi ini ditampilkan Radar Sampit dengan mengutip teks berikut.

“...Terkait upaya pemerintah sendiri, Yudi menyebutkan pemerintah akan berkomitmen menjaga dan menjamin hak setiap pemeluk agama. Bahkan, safari klenteng kemarin, merupakan bagian dari upaya negara menjamin kelompok tionghoa merayakan hak atas identitas budaya. Tugas pemerintah adalah berkomitmen menjaga dan menjamin hak setiap pemeluk agama. Termasuk menghindari politik identitas yang memecah belah...”

Politik identitas di tahun politik dituding sebagai peniup situasi yang sudah pelik di masyarakat. Di masyarakat ada indikasi perpecahan namun politik identitas memberikan tiupan angin yang membuat kobaran api perpecahan menjadi semakin berkobar. Dimana politik identitas di Indonesia yang paling pas dijual adalah persoalan agama.

Bingkai yang dihasilkan oleh pemberitaan Radar Sampit pada berita kedua tanggal 17/02/2018 adalah Kerukunan SARA terancam karena

politik identitas dengan motif kekuasaan, pemerintah siap melindungi masyarakat. Dijelaskan bahwa politik identitas marak terjadi di Indonesia menjelang Pilkada. Kondisi tersebut terjadi karena adanya “elit” atau “aktor intelektual” yang punya kepentingan politik kekuasaan, sengaja memainkan politik identitas untuk memecah belah masyarakat. Dalam hal ini pemerintah digambarkan sebagai sosok yang melawan ancaman kerukunan SARA, menjadi “pelindung masyarakat SARA” melawan oknum pemecah belah, termasuk elit yang memainkan isu identitas politik, demi kepentingan kekuasaan saat Pilkada. Beyme dalam Kristinus (2016, hal. 99) bahwa politik identitas terjadi di masyarakat sebenarnya berawal dari gerakan sosial untuk mengubah kondisi masyarakat, namun berakhir dimanfaatkan oleh kelompok mayoritas untuk menghegemoni kekuasaannya. Melalui pola-pola penggunaan identifikasi antara kelompok dan golongan bahkan SARA.

Lebih spesifik dan khusus, Radar Sampit menampilkan pemberitaan ini untuk mengajak masyarakat SARA yang ada di Kalimantan agar menghindari politik identitas. Apalagi Kalimantan sebelumnya pernah merasakan konflik sosial di masyarakat karena SARA, sehingga politik identitas ditakutkan dapat menciptakan potensi konflik, hingga penghegemonian kekuasaan oleh mayoritas kepada minoritas. Seperti yang disebutkan oleh Kristinus (2016, hal. 88) bahwa di Kalimantan politik identitas marak terjadi, sehingga wilayah wilayah terbagi atas dasar etnisitas, ekstrimnya politik identitas di Kalimantan telah menjadi acuan dalam merubah administrasi pemerintahan.

### **Berita Ketiga**

Radar Sampit, Kamis, 22 February 2018

Judul Berita : Tiga Jenderal Cari Bukti Kreator Penganiayaan Ulama.

*Define Problems*, pada berita ini Radar Sampit menunjukkan bahwa penyerangan bagi pemuka agama merupakan ancaman bagi kerukunan di Indonesia dan merupakan permasalahan keamanan yang serius bagi negara. Untuk itu negara hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti yang ditampilkan dalam teks berita berikut :

“...menurutnya, langkah tersebut diambil karena instruksi dari presiden Jokowi. Serta, karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memiliki perhatian yang besar dalam peristiwa-peristiwa tersebut...”

*Diagnose Causes*, penyebab permasalahan yang diajukan oleh Radar Sampit terdiri dari dua bagian., yakni motif konspirasi, atau memang natural terjadi. Gambaran ini ditampilkan karena Radar Sampit pada pemberitaan ini belum mengetahui secara jelas siapa pelaku sebenarnya, karena pelaku juga masih dicari oleh kepolisian. Dengan demikian penyebab masalah yang ditampilkan adalah dugaan-dugaan yang coba diangkat oleh Radar Sampit, sebagai bentuk akumulasi pertanyaan “kira-kira siapa pelaku penyerangan ?” Gambaran ini dapat ditangkap bila mencermati teks berita yang disusun Radar Sampit berikut.

“...Adakah konspirasi dalam rentetan kejadian yang mengancam ulama atau justru peristiwa ini terjadi secara natural, tanpa kaitan? ...”

Namun meskipun muncul pertanyaan, Radar Sampit menduga kuat bahwa kasus ini adalah konspirasi. Dugaan kuat ini ditampilkan dengan metode seleksi isu, dan penempatan informasi, melalui serangkaian kutipan yang disusun agar konspirasi menjadi alasan utama kasus penyerangan. Salah satu bagian seleksi isu tersebut dapat dicermati melalui kutipan berikut, yang diangkat dari narasumber dengan kredibilitas menjawab yang tinggi, karena merupakan tokoh agama, Din Syamsudin.

“...Ketua dewan pertimbangan MUI Din Syamsudin menuturkan, peristiwa-peristiwa ini dalam analisis logika yang terbatas dapat disimpulkan ada rekayasa sistematis. “dalam analisa ilmiah juga sama kesimpulannya,” terangnya. Ada macam-macam motif terhadap penyerangan , seperti motif konspirasi, atau memang natural terjadi. Namun dugaan kuat konspirasi...”

*Make Moral Judgement*, memperkuat penyebab permasalahan penyerangan pemuka agama adalah isu konspirasi, Radar Sampit memberikan penilaian moralnya terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Negara hadir dalam situasi yang mengancam keamanan masyarakat. Gambaran ini bisa diamati dengan menginterpretasikan teks berikut.

“...Menurutnya langkah tersebut diambil karena instruksi Presiden Jokowi . Serta, karena Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang memiliki perhatian yang besar dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Polri dalam hal ini benar-benar ingin menciptakan keaamanan ,” terang jenderal berbintang tiga tersebut...

”

*Treatment Recommendation.* Sebagai langkah solusi bagi permasalahan ini, Radar Sampit menampilkan rekomendasi penyelesaian masalah diantaranya adalah memberi perlindungan terhadap pemuka agama, khususnya ulama, serta menindak tegas pelaku penyerangan simbol keagamaan. Untuk rekomendasi yang pertama dapat dilihat pada kutipan teks berikut :

“...Datangi dan lindungi agar tidak terulang. Saya sempat melihat ada mobil polisi di sebuah masjid tadi. Saya yakin ini sedang koordinasi mengamankan ulama,” papar Kasatgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tersebut...”

Sedangkan untuk memperlihatkan langkah tegas yang perlu dilakukan oleh aparat keamanan, sebagai langkah solutif menyelesaikan masalah. Radar Sampit menampilkan kutipan teks berikut :

“...Untuk kasus yang di Jogjakarta, dia menuturkan bahwa sangat memahami apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Peristiwa itu merupakan kejadian terorisme. Yang memerlukan tindakan tegas dari aparat. “Tindakan tegas ini perlu karena sering kali ancamannya besar. Seperti Sulteng beberapa tahun lalu, mendadak tiga polisi ditembak orang. Dua polisi meninggal dan satu luka,” ujarnya...”

Kedua teks ini merupakan hasil kutipan yang diambil dari narasumber Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, jenderal bintang tiga, dengan posisi Kabareskrim dan Kasatgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang artinya juga bahwa solusi ini memiliki nilai kredibilitas yang tinggi karena datang dari posisi yang sesuai, aparat yang memimpin penyelidikan kasus kriminal.

Pada berita ketiga ini issue yang ditonjolkan adalah penyerangan pemuka agama di Gereja Lidwina adalah sebuah gerakan yang tersistimatis. Radar Sampit melihat bahwa kejadian ini merupakan puncak gunung es dimana kalau tidak ditangani secara serius oleh negara maka akar masalah dan potensi gerakan akan tetap terjadi dan menjadi ancaman berikutnya. Maka Radar Sampit, menekankan bahwa negara harus hadir dalam peristiwa ini karena peristiwa penyerangan tersebut bukan persoalan criminal biasa namun menyangkut pondasi keindonesiaan.

Berita ketiga Radar Sampit berjudul “Tiga Jenderal Cari Bukti Kreator Penganiayaan Ulama” terbitan 22/02/2018 dan berita keempat

berjudul “Gangguan Sama Seperti Teror 98” terbitan 23/02/2018 ini sama-sama membingkai peristiwa penyerangan pemuka agama tersistematis, pelaku adalah elit politik/ aktor intelektual dengan tujuan politis, hingga negara siap tindak tegas pelaku. Kesiapan negara ditampilkan dengan memunculkan tiga Jenderal yang ditugaskan untuk menangani kasus yang diduga “berbau” konspirasi tersebut.

Disisi lain bingkai penyerangan ulama dengan “dalang” aktor politik ini disangkut-pautkan dengan kondisi Indonesia tahun 1998, sebelum reformasi, ketika para tokoh agama utamanya ulama mengalami kekerasan sebagai akibat menolak kekuasaan resim otoritarian. Menurut Ramage (2005, hal. 86) peristiwa politik 1998 memang tidak bisa dilepaskan dengan Islam dan Ulama. apalagi reformasi 1998, dimotori salah satunya oleh Islam dan Ulama melalui organisasi keagamaan Nahdlatul ‘Ulama (NU) yang menganggap Soeharto sebagai “ancaman pancasila” dan mendompleng Islam untuk maksud kekuasaan. Dampak dari itu adalah banyak insiden kekerasan terhadap masyarakat utamanya Islam dan Ulama. Salah satunya adalah peristiwa penyerangan terhadap tokoh agama utamanya NU, dalam operasi memberantas dukun santet yang dilakukan ABRI tahun 1998. Hal ini sama halnya mengingatkan masyarakat Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah yang pernah dilanda kerusuhan berbasis sentiment etnis.

### **Berita Keempat**

Radar Sampit, Jumat, 23 February 2018

Judul Berita : Gangguan Sama Seperti Teror 98

*Define Problems.* Permasalahan yang coba diangkat oleh Radar Sampit dalam berita ini adalah penyerangan terhadap sejumlah pemuka dan simbol keagamaan, utamanya Islam, dan Ulama. Berpola seperti teror kiai pada kejadian tahun 1998. Dalam mendefinisikan masalah ini Radar Sampit membandingkan aksi saat ini dan aksi pada tahun 98, dilatarbelakangi oleh kepentingan politik praktis dan pragmatis. Penggambaran masalah dapat dicermati pada penggalan teks berita *lead* berikut/

“Pakar Sejarah Nusantara Agus Sunyoto memandang, gangguan yang terjadi pada pesantren dan kiai beberapa hari terakhir sama polanya dengan teror kiai pada tahun 1998. Menjelang lengsernya orde baru...”

Pada dasarnya penempatan permasalahan ini pada *lead* berita, bagian yang dianggap “sakral” oleh jurnalist karena menjadi tempat menempatkan informasi penting sehubungan dengan peristiwa, dapat dianggap sebagai cara Radar Sampit untuk mendefinisikan bahwa peristiwa penyerangan berpola teror tahun 98 terhadap Ulama adalah topik penting dan serius yang perlu dibahas. Selain sebagai pengingat sejarah, isi berita seolah mengingatkan betapa traumatisnya peristiwa yang berlatar pada politik identitas.

*Diagnose Causes*, Meskipun pada peristiwa sesungguhnya belum terdapat pelaku yang ditangkap serta muncul dugaan-dugaan motif pelaku yang masih simpang siur, Radar Sampit datang dengan kesimpulan yang tegas dalam pemberitaannya bahwa pelaku penyerangan Ulama adalah konspirasi “elit” dengan tujuan politik praktis. Untuk membentuk pernyataan ini, Radar Sampit pertama-tama menghilangkan motif-motif lain penyerangan yang mungkin terjadi, digantikan dengan satu motif asli yakni konspirasi, yang datanya didatangkan langsung melalui kutipan dari Pakar Sejarah Nusantara Agus Sunyoto. Ia menganggap peristiwa ini tidak lagi bisa dianggap sebagai kebetulan karena telah melalui tiga kali insiden. Berikut teksnya

“...Dalam ilmu intelejen kata Agus, dikenal rumus dasar bahwa sekali atau dua kali kejadian bisa dikatakan kebetulan, tapi jika sudah tiga kali, maka insiden tersebut sudah merupakan kesengajaan (by design).”nggak mungkin peristiwa terjadi begitu saja, ini polanya sama (dengan 98, Red),” kata Agus...”

Potensi motif konspirasi ini digali lebih dalam lagi, untuk menunjukkan bahwa, benar adanya motif konspirasi tersebut. dalam hal ini, Radar Sampit mengaitkan isu penyerangan terhadap Ulama dengan jelang Pilkada 2018, untuk menunjukkan bahwa kejadian ini mirip dengan yang terjadi pada teror kiai tahun 1998, yang benuansa politis dilakukan untuk mempertahankan rezim Orde Baru. Untuk itu dikutip pernyataan narasumber yang mengatakan bahwa ada kepentingan politik dibalik penyerangan terhadap pemuka agama. Berikut teksnya :

“...Pengasuh Pondok Pesantren Global Tarbiyatul Arifin Malang ini memiliki keyakinan bahwa gangguan ini ada kaitannya dengan Pilkada yang akan berlangsung dalam waktu dekat. “biasanya yang diserang memang pihak-pihak yang memiliki pengaruh kuat terhadap suara pemilih,” ungkapnya...”

Memperkuat dugaan bahwa penyebabnya adalah konspirasi “elit” Radar Sampit kemudian mengutip narasumber Wasekjend dan Sejarawan PBNU, Abdul Mun'im DZ, yang menyebutkan bahwa ada intelektual yang “bermain” pada peristiwa aksi penyerangan ulama. Pernyataan ini menjadi penegas bahwa penyerangan ulama disebabkan oleh motif konspirasi untuk kepentingan elektoral Pilkada 2018. Berikut teksnya :

“...Menurut Mu'in juga bisa jadi bahwa ada aktor intelektual dibalik beberapa gangguan yang terjadi di beberapa daerah. (Wasekjend dan Sejarawan PBNU, Abdul Mun'im DZ)...”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyebab kejadian penyerangan pemuka agama adalah bermotif konspirasi, dirancang khusus demi kepentingan dan tujuan politik. Dan bukan tanpa motif sama sekali.

*Make Moral Judgement*, Penilaian moral dibutuhkan oleh Radar Sampit untuk mempertegas bahwa berita penyerangan terhadap pemuka agama adalah bermotif konspirasi “elit.” Untuk itu Radar Sampit melakukan penilaian bahwa Ulama adalah tokoh yang telah berpengalaman mengatasi ancaman dan teror, tidak mudah digesekan, bahkan oleh “elit” sekalipun, dibuktikan dengan eksistensi Ulama terhadap PKI pada konflik tahun 1965 dan pemerintahan Orde Baru yang berakhir tahun 1998. Penilaian moral ini dapat dicermati pada kutipan berikut.

“...Para Ulama yang menjadi sasaran teror bermotif politik menurut Nabil bukanlah hal baru. Para kiai NU dekade tahun 65 saat bergesekan dengan PKI dan tahun 98 dengan Orde Baru. “Makanya mau digoreng seperti apa kami tidak akan tergoreng (terpancing, Red),” katanya...”

*Treatment Recommendation*, Radar Sampit mencoba menjadi media yang solutif dengan menghadirkan sekiranya tiga rekomendasi yang dapat digunakan untuk mengantisipasi teror terhadap Ulama. Rekomendasi ini didatangkan langsung melalui narasumber yang berkaitan dengan Ulama. Hal ini dilakukan dengan maksud agar mendapat kredibilitas, bisa dipercaya sebagai solusi dengan langkah-langkah yang efektif karena bersumber dari pihak yang paham permasalahan.

Langkah pertama dan kedua yang dihadirkan adalah meningkatkan mekanisme penanganan ulama dari lingkungan sekitar ulama, serta

silaturahmi terhadap sesama ulama untuk meningkatkan kewaspadaan akan informasi dan isu pemecah belah. Dalam hal ini Ulama PBNU akan dilindungi oleh Pagar Nusa dan Barisan Serba Guna (Banser). Interpretasi ini diangkat dari teks berikut :

“...Tapi, Nabil memastikan para kiai tetap aman. Pagar Nusa telah memiliki mekanisme penanganan khusus . “Pengamanan kami melekat dan tertutup,” Tuturnya. Nabil juga optimis anggotanya tidak akan kecolongan. Silaturahmi tetap dijalin oleh pengurus pagar nusa terhadap Ulama di daerah masing-masing. Informasi terhadap situasi di sekeliling kiai juga update baik dari internal maupun kerjasama dengan aparat. “Jadi kami pasti tahu apa yang terjadi,” katanya...”

Langkah ketiga, yang direkomendasikan adalah mengajak semua pihak agar tidak terprovokasi isu-isu pemecah belah. Rekomendasi ini mengutip pernyataan Wasekjend dan Sejarawan PBNU, Abdul Mun'im DZ, yang melalui pendekatan seleksi dan penonjolan isu dapat pula dianggap sebagai cara untuk menunjukkan bahwa solusi ini langkah yang efektif dan perlu diikuti karena datang langsung dari organisasi besar PBNU. Interpretasi ini dapat dipahami dengan melihat teks Mu'in yang mengatakan “Makanya semua pihak harus bisa menahan diri.”

Solusi yang ditampilkan adalah proteksi pribadi masing-masing ulama sesuai dengan wilayah dan lingkungan ulama berada, menjalin silaturahmi dengan pihak-pihak lainnya utamanya sesama ulama, tidak mudah terprovokasi terhadap isu pemecah belah.

### **Berita kelima**

Radar Sampit, Sabtu, 24 February 2018

Judul Berita : Cegah Isu SARA, Tampung Aspirasi Masyarakat Pesisir

*Define Problems*, Masalah yang coba dihadirkan oleh Radar Sampit dalam berita ini adalah ancaman bagi kerukunan SARA. ancaman ini membayangi kerukunan dan perdamaian masyarakat SARA, khususnya pada masyarakat pesisir yang menjadi subjek pemberitaan. Memberikan gambaran bahwa ancaman isu SARA adalah penting dan menyeluruh kepada setiap golongan, Radar Sampit memperlihatkan bahwa isu ini ditanggapi oleh serangkaian tokoh penting yang mewakili SARA, maupun aparat keamanan. Hal ini dapat dilihat pada penggalan teks berikut ini :



“...Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda berkumpul di Masjid Besar Husnul Hudi, Kelurahan Samuda Kota, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Rabu (21/2) pagi. Camat Mentaya Hilir Selatan Muzaifah kepada Radar Sampit mengatakan pertemuan tersebut selain untuk mempererat tali silaturahmi, juga memberi masukan kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dengan isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan...”

Dengan demikian pendefinisian masalah oleh Radar Sampit semakin jelas, selain menampilkan bahwa isu SARA menjadi ancaman kerukunan dan perdamaian masyarakat. Isu ini semakin terlihat penting karena jumlah partisipasi masyarakat yang memberi perhatian terhadap peristiwa ini semakin serius dan melembaga

*Diagnose Causes*, Radar Sampit tidak secara spesifik dan mendalam menjelaskan mengenai penyebab permasalahan, hanya saja disebutkan secara umum penyebab utama konflik di masyarakat adalah disebabkan oleh isu-isu negatif SARA yang marak tersebar di masyarakat. Teks yang mewakili dan menggambarkan penyebab masalah dapat dilihat dibawah ini :

“...Isu SARA bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, maka itu masyarakat harus bisa menangkalnya,” tandas perwira yang menjabat sebagai Kasatrola Ditpolairud Polda Kalteng ini...”

Dari teks diatas, Penyebab dari konflik digambarkan adalah isu-isu SARA yang terjadi di masyarakat, bila melihat pada peristiwa sebelum berita ini ditampilkan, isu-isu SARA yang terjadi dimasyarakat pada periode 24/02/2018 adalah isu penyerangan terhadap pemuka dan simbol keagamaan yang mengancam stabilitas negara.

*Make Moral Judgement*, Langkah untuk memperkuat penyebab permasalahan yang muncul karena isu negatif SARA yang dilakukan oleh oknum, Radar Sampit mengemas penilaian moralnya terhadap peristiwa. Pada berita ini, Radar Sampit menilai bahwa isu negatif SARA, tidak akan mampu mengoyahkan masyarakat karena hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat bantu menjaga perdamaian dan kerukunan SARA. Utamanya di daerah pesisir yang menjadi objek berita. Masyarakat dianggap telah mengerti pentingnya kerukunan hidup SARA, sehingga siap membantu aparat keamanan untuk menjaga kerukunan tersebut. Selain itu Radar Sampit menilai bahwa kecenderungan masyarakat pesisir untuk saling memahami di antara perbedaan SARA, muncul

sebagai hasil dari silaturahmi yang sering kali dilakukan antara tokoh masyarakat dan aparat. Pertemuan keduanya sering kali membahas serta membicarakan topik-topik perdamaian dan kerukunan SARA serta meningkatkan rasa kebersamaan dalam diri masyarakat. Interpretasi ini dapat dicermati setelah melihat teks berikut

“...Sementara, perwakilan Dipolairud Polda Kalteng, AKBP Sulistiyono menerangkan saat ini hubungan masyarakat pesisir dengan kepolisian terjaga dengan baik dan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban, maka diadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat ini. “Adanya Silaturahmi ini, maka permasalahan kecil bisa diatasi dan masalah besar dihadapi bersama-sama,” ucap Sulistiyono...”

*Treatment Recommendation*, Solusi yang dihadirkan Radar Sampit, sebagai langkah menjaga kerukunan SARA adalah berkolaborasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan segala. Hal tersebut diharapkan akan mampu menghindari dari ancaman isu negatif SARA. Rekomendasi penanganan masalah dapat dicermati melalui penggalan kalimat berikut :

“...Menurutnya, berkolaborasi dengan seluruh aspek, berkomunikasi, koordinasi sangat penting sehingga masyarakat tidak terpengaruh isu-isu SARA...”

Pada berita kelima, “Cegah Isu SARA, Tampung Aspirasi Masyarakat Pesisir” Hasil bingkai Radar Sampit pada berita ini adalah Aparat keamanan bersama masyarakat siap cegah isu negatif SARA melalui silaturahmi, menjaga masyarakat SARA dari isu-isu negatif yang memecah belah. Silaturahmi dianggap dapat menjadi Langkah untuk melakukan kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi antara masyarakat SARA dan aparat keamanan, guna melindungi masyarakat dari potensi ancaman SARA. Lebih dikenal dalam konteks agama Islam *silaturahmi* muncul sebagai cara Islam menjalin hubungan antar sesama maupun kelompok diluarnya. Oleh Zawawi (2015, hal. 97) yang membahas politik dan Islam, dijelaskan bahwa *silaturahmi* dilakukan oleh penganut agama Islam untuk mencegah semua kecenderungan untuk menjadi sesat atau berbeda paham atas dasar perbedaan ras, bahasa, wilayah ataupun semua pertimbangan materalistis lainnya serta untuk melestarikan dan memperkuat kesatuan.

Tidak hanya masalah *silaturahmi* dalam berita ini turut disertakan peran Radar Sampit dalam literasi politik bagi masyarakat pesisir. Radar Sampit menampilkan bahwa politik seharusnya melihat pula masyarakat

peisir agar terciptanya keadilan politik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi oleh Gatara & Nurjaman (2017, hal. 149) bahwa masyarakat peisir itu marginal secara geografis dan politis, bahkan masih kurang literasi politik kepada masyarakat peisir. Dengan demikian Radar Sampit mencoba mengkritisi kondisi literasi politik Indonesia saat ini yang belum bisa mencakup semua penduduk Indonesia, utamanya masyarakat peisir. Padahal ketentuan hukum di Indonesia mengatur tentang pendidikan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Tertuang dalam UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

## **Penutup**

Tema yang menonjol dalam pemberitaan Radar Sampit (media cetak yang beredar di Kalimantan Tengah) adalah adanya ancaman kerukunan yang berhubungan dengan SARA. Dalam hal ini Radar Sampit membingkai berita dengan menekankan bahwa ancaman ini bukan antar agama atau agama Islam yang tidak toleran tetapi menekankan adanya aktor-aktor politik dibalik peristiwa yang mengancam kerukunan. Politisasi yang menjadi bingkai utama diharapkan bisa meredam konflik antar agama dan antar golongan karena memang selama ini daerah Kalimantan sangat kental dengan politik identitas. Dengan bingkai yang meredam konflik ini, Radar Sampit sadar akan sensitivitas pemberitaan yang berkaitan dengan SARA dan berusaha mengambil posisi lebih posisi bahwa agama sering menjadi korban pelaku politisasi. Dengan demikian, framing ini bisa memberikan alternatif gambaran Islam yang sebenarnya toleran tetapi sering menjadi korban kooptasi politisasi kekuasaan.

Mengamati hasil analisis bingkai masing-masing berita, Radar Sampit mempersepsi keberagaman berdasarkan sudut pandang SARA utamanya Islam. Bahwa sektarian keagamaan yang muncul di Indonesia sejak orde baru, Politik identitas yang menunggangi SARA utamanya agama Islam adalah “dalang” dari munculnya konflik keberagaman di Indonesia. Penyerangan ulama adalah hasil dari sektarian yang masih memegang teguh bahwa nilainya lebih baik dari kelompok lainnya, hingga politisi yang ingin menghegemoni kekuasaannya. Kedua poin ini dianggap “biang” radikalisasi karena menghambat, bahkan membuat masyarakat cenderung apatis dengan situasi sosial yang ada di masyarakat.

Disisi lain Radar Sampit juga menampilkan peran Islam dan Ulama dalam politik Indonesia, untuk mengimbangi pemberitaan radikalisme

yang menunggangi Islam. Bahwa Islam dan Ulama telah berjuang saat 1998 untuk mencapai Indonesia yang *sekuler* hidup dalam nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila, disisi lain Islam dan Ulama juga berperan dalam pemberdayaan politik, melalui *silaturahmi*, hingga literasi politik pada masyarakat pesisir. Secara khusus Radar Sampit sebenarnya menyempitkan pandangan pada penganut Islam di Kalimantan. Bahwa Kalimantan yang dominan Islam bisa merangkul SARA lain, termasuk masyarakat pesisir. Agar berpolitik praktis dengan mengutamakan nilai-nilai keberagaman.

Pada berita pertama, Radar Sampit membingkai akar masalah radikalisme di Indonesia karena mudahnya akses masyarakat pada sumber-sumber informasi mengenai radikalisme. Sumber informasi tersebut bisa dari masyarakat dan internet. Pada berita kedua, bingkai yang dihasilkan oleh pemberitaan Radar Sampit adalah kerukunan SARA terancam karena politik identitas dengan motif kekuasaan, pemerintah siap lindungi masyarakat. Pada berita ketiga secara keseluruhan *frame* yang dihasilkan adalah penyerangan pemuka agama tersistematis, negara siap tindak tegas pelaku. Meskipun tidak menafikkan kemungkinan hanya fenomena natural atau biasa (tidak tersistematis), namun gaya penulisan berita memberatkan pada gerakan yang tersistematis terhadap penyerangan pemuka dan simbol keagamaan. Untuk mempertegas bahwa pemerintah aktif menolak pemahaman radikal, termasuk penyerangan terhadap pemuka dan simbol keagamaan, ditampilkan “elit” yang akan berkecimpung langsung menangkal dan menyelesaikan masalah ini sebagai sumber berita.

Sedangkan pada berita keempat, bingkai berita Radar Sampit mengenai peristiwa penyerangan Ulama berpola “teror 98” adalah Penyerangan terhadap pemuka dan simbol agama sistematis oleh aktor intelektual, Ulama dan Islam tak mudah terprovokasi. Sedangkan pada berita kelima, tumpuan situasi yang damai di Kota Sampit adalah kerjasama antara aparat keamanan dan opinion leader masyarakat yaitu ulama.

Politik identitas merupakan hal yang sangat kuat dianggap sebagai penyebab konflik keberagaman di Indonesia. Oleh karena itu, kehadiran negara dalam berbagai lembaganya dianggap harus serius dalam menangani permasalahan tersebut bagi secara promotive, preventif, kuratif hingga rehabilitative. Sehingga keberagaman bukan lagi sebagai ancaman namun sebagai modal social kekayaan keindonesiaan.

## Daftar Pustaka

- Eriyanto (2012). *Analisa Framing*. LKIS. Yogyakarta
- Nihaya (2014). Pandangan Masyarakat Terhadap Pluralisme dan Radikalisme di Makassar. *Jurnal Sulesana*. Volume 9, No. 2.
- Kholik, A. (2017). Pendidikan Islam dan Fenomena Radikalisme Agama. *Jurnal Pendidikan*, Volume 05, No. 1.
- Zawawi, A. (2015). Politik dalam Pandangan Islam. *Jurnal Ummul Qura* Vol. 05 No 1.
- Kristinus. (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat. *Jurnal Politik Indonesia: Indonesia Politic Review* vol 1. Hal. 87-101
- Gatara, A. Sahid; Nurjaman, K. (2017). *Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai politik*. JISPO Vol. 7 No.2. Juli-Desember 2017
- Hayward, Clarissa Rile and Watson, Ron. (2010). *Identity and Political Theory*. Washington University Journal of Law & Policy Vol.3. [http://openscholarship.wustl.edu/law\\_journal\\_law\\_policy/vol33/iss1/3](http://openscholarship.wustl.edu/law_journal_law_policy/vol33/iss1/3)

# Politik Identitas dalam Bingkai Keberagaman di Radar Sampit

## ORIGINALITY REPORT

% **3**

SIMILARITY INDEX

% **3**

INTERNET SOURCES

% **2**

PUBLICATIONS

% **1**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

[radarpekalongan.co.id](http://radarpekalongan.co.id)

Internet Source

% **1**

**2**

[ejournal.iainpurwokerto.ac.id](http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

% **1**

**3**

[scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id)

Internet Source

<% **1**

**4**

Submitted to Universitas Katolik Widya Mandala

Student Paper

<% **1**

**5**

[semuamakalahpembelajaran.blogspot.com](http://semuamakalahpembelajaran.blogspot.com)

Internet Source

<% **1**

**6**

[repository.iainpurwokerto.ac.id](http://repository.iainpurwokerto.ac.id)

Internet Source

<% **1**

**7**

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<% **1**

**8**

Abdul Kholik. "Pendidikan Islam dan Fenomena Radikalisme Agama", Jurnal Kependidikan, 2017

Publication

<% **1**

**9**

[journal.uinsgd.ac.id](http://journal.uinsgd.ac.id)

Internet Source

<% **1**

**10**

[journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)

Internet Source

<% **1**

**11**

[repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id)

Internet Source

<% **1**

---

EXCLUDE QUOTES ON  
EXCLUDE ON  
BIBLIOGRAPHY

EXCLUDE MATCHES < 10  
WORDS